

BAB 2

PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENDUDUKAN SEKUTU

2.1 Pemegang Kekuasaan di Jepang

Dalam usaha untuk melaksanakan seluruh tujuan pendudukan di Jepang, Sekutu menciptakan badan-badan yang bertugas merumuskan, menjalankan, dan mengawasi seluruh kebijakan yang diterapkan di Jepang. Komisi Penasehat Timur Jauh atau *Far Eastern Advisory Commission* (FEAC), Komisi Timur Jauh atau *Far Eastern Commission* (FEC), dan Dewan Sekutu atau *Allied Council* didirikan untuk memegang kendali atas Jepang.

2.1.1 Komisi Penasehat Timur Jauh atau *Kyokutō Shimon Iinkai* (極東諮問委員会) atau *Far Eastern Advisory Commission* (FEAC)

Amerika Serikat dalam kapasitasnya sebagai blok Sekutu yang menang perang melawan Jepang dan juga yang menanggung kerugian paling besar dalam perang ini merasa memiliki hak yang paling besar dalam memegang kendali kekuasaan di Jepang dan berharap negara-negara sekutu lainnya juga setuju untuk memberikan tanggung jawab sebagai pemimpin utama pendudukan di Jepang kepada Amerika Serikat. Amerika Serikat juga menginginkan negara-negara sekutu lainnya yang terlibat dalam perang ini ikut berperan serta dalam pendudukan di Jepang, hanya saja dalam kapasitasnya sebagai pemberi saran di dalam perumusan kebijakan-kebijakan yang diterapkan di Jepang. Oleh karena itu, pada tanggal 21 Agustus 1945, ketika persiapan untuk upacara penyerahan Jepang dibuat, Amerika Serikat menyarankan untuk dibentuknya badan internasional yang akan membantu merumuskan kebijakan yang akan dijalankan di Jepang dan juga untuk memastikan bahwa Jepang melaksanakan kewajiban mereka. Amerika Serikat mengusulkan kepada Cina, Inggris, dan Uni Soviet, sebagai pihak yang

ikut berpartisipasi dalam perang, untuk mendirikan *Far Eastern Advisory Commission* (FEAC) atau Komisi Penasehat Timur Jauh.

Amerika Serikat mengusulkan bahwa komisi ini bertugas untuk membuat rekomendasi atau saran dalam merumuskan kebijakan-kebijakan, prinsip-prinsip dan batasan-batasan yang akan diterapkan dalam pemenuhan penyerahan Jepang. FEAC juga memberikan saran dalam mengambil langkah yang diperlukan untuk menjamin penyerahan secara penuh oleh Jepang dengan ketetapan dalam dokumen penyerahan.

Amerika Serikat mulai mendirikan FEAC dengan mengundang perwakilan dari Inggris, Uni Soviet, Cina, Perancis, Belanda, India, Australia, New Zeland, Kanada, dan Filipina, untuk membuat usulan perumusan kebijakan pendudukan. Tetapi untuk selanjutnya, Uni Soviet menyatakan mundur dari keanggotaan FEAC dengan alasan bahwa kekuasaan dari FEAC ini terbatas hanya kepada pemberi saran saja dan lebih memilih untuk mendirikan *Allied Control Commission* yang sama dengan yang didirikan di Jerman ketika Sekutu berhasil menduduki Jerman. Negara-negara lainnya, bagaimanapun, tetap bergabung dengan Amerika Serikat dalam FEAC, dan mengadakan pertemuan pertama mereka di Washington pada tanggal 30 Oktober 1945 untuk membahas mengenai pelucutan senjata dan rehabilitasi Jepang.

2.1.2 Komisi Timur Jauh atau *Kyokutō Iinkai* (極東委員会) atau *Far Eastern Commission* (FEC) dan Dewan Sekutu atau *Tainichi Rijikai* (対日理事会) atau *Allied Council*

Di Jepang, Amerika Serikat mendapat peran yang sangat dominan di dalam menentukan kebijakan pendudukan. Partisipasi dari kekuatan Sekutu lainnya di dalam menentukan kebijakan tidak secara efektif berjalan sampai dibentuknya Komisi Timur Jauh atau *Far Eastern Commission* (FEC) tanggal 27 Desember 1945.

Melihat adanya ketidakpuasan salah satu dari empat negara besar di Timur Jauh yaitu Uni Soviet atas pembentukan FEAC ini, maka diadakanlah perundingan ulang untuk membicarakan kembali sifat dasar keikutsertaan Sekutu dalam pendudukan di Jepang pada bulan Desember 1945. Pertemuan ini dihadiri

oleh menteri luar negeri Amerika Serikat, Inggris, dan Uni Soviet yang bertemu di Moskow. Setelah mendapat persetujuan dari Cina sebagai salah satu dari empat kekuatan besar di Timur Jauh, maka didirikanlah Komisi Timur Jauh atau *Far Eastern Commission* (FEC) sebagai pengganti dari FEAC.

FEC yang berkedudukan di Washington terdiri dari satu perwakilan dari tiap-tiap negara yaitu Amerika Serikat, Inggris, Uni Soviet, Cina, Australia, New Zeland, India, Kanada, Belanda, Perancis, dan Filipina. Anggota FEC bertambah menjadi tiga belas negara ketika Burma dan Pakistan bergabung di dalamnya. Setiap keputusan komisi ini, membutuhkan persetujuan dari mayoritas seluruh anggota termasuk Amerika Serikat, Inggris, Uni Soviet, dan Cina.

Ketentuan-ketentuan yang diambil oleh FEC juga harus mewakili pertimbangan antara kedudukan Amerika Serikat yang memiliki tanggung jawab utama atas pendudukan Jepang dan kedudukan Uni Soviet dimana hak persamaan dari 4 kekuasaan Besar di Timur Jauh (Amerika Serikat, Inggris, Uni Soviet, dan Cina) harus terpelihara. Lebih jauh lagi, FEC harus memenuhi keinginan kekuatan utama Sekutu lainnya yang ikut berperang juga dengan Jepang untuk mendapatkan peran yang lebih besar dalam menentukan kebijakan pendudukan di Jepang dibandingkan dengan yang disediakan FEAC dalam kerangka yang terbatas.⁶

Dalam kedudukannya sebagai komisi yang berwenang dalam perumusan kebijakan pendudukan, FEC mempunyai kuasa untuk :

1. Merumuskan kebijakan sampai Jepang dapat memenuhi tuntutan penyerahan.
2. Meninjau, permintaan setiap anggota, setiap perintah yang diberikan kepada SCAP atau setiap tindakan yang diambil oleh SCAP yang melibatkan keputusan kebijakan yang dirumuskan FEC.
3. Mempertimbangkan masalah-masalah lain yang diberikan kepadanya oleh persetujuan di antara anggotanya.⁷

FEC juga memiliki keterbatasan-keterbatasan di dalam menjalankan fungsinya. FEC tidak diperbolehkan untuk membuat rekomendasi dalam hal mengadakan operasi militer atau pun dalam hal pengaturan wilayah Jepang.

⁶ Huger Borton, *Japan; Occupation* (New York, 1951), hlm.300

⁷ *Ibid.*

Selain itu, jika ada masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh kebijakan yang sudah ditetapkan oleh FEC, Amerika Serikat lah yang berhak untuk memberikan perintah sementara kepada Panglima Tertinggi.⁸

Perundingan di Moskow juga menghasilkan keputusan untuk mendirikan Allied Council atau Dewan Sekutu di Tokyo. Dewan ini terdiri dari Panglima Tertinggi atau wakilnya sebagai pimpinan dan perwakilan dari Amerika Serikat, satu anggota masing-masing dari Uni Soviet dan Cina, dan satu anggota mewakili gabungan dari Inggris, Australia, New Zeland, dan India. Tujuan dari dewan ini adalah untuk mengkonsultasikan dan memberi saran kepada Panglima Tertinggi berkenaan dengan pelaksanaan syarat-syarat penyerahan, pendudukan dan pengendalian Jepang, dan memberikan perintah tambahan kepadanya. Dalam pelaksanaannya, Panglima Tertinggi atau SCAP tidak berkewajiban untuk berkonsultasi dengan Dewan Sekutu ataupun menerima sarannya. Hal ini harus dilakukan hanya jika berkenaan dengan pelaksanaan keputusan kebijakan FEC yang akan dijalankan oleh SCAP mengenai perubahan fundamental dalam struktur konstitusi Jepang atau pemerintah Jepang atau perubahan-perubahan di dalam pemerintahan Jepang, dewan sekutu dapat secara efektif ikut campur tangan. Bila dewan sekutu atau siapapun anggota di dalamnya tidak setuju dengan pelaksanaan kebijakan FEC yang dijalankan Panglima Tertinggi atau SCAP, maka Panglima Tertinggi harus menghentikan aktifitas mereka sampai FEC meninjau permasalahan tersebut dan membuat sebuah keputusan.

Untuk sementara, antara penyerahan Jepang sampai berjalannya Organisasi FEC pada 26 Februari 1946, Amerika Serikat memegang tanggung jawab tunggal untuk merumuskan kebijakan yang akan dijalankan di Jepang sesuai dengan konteks umum Deklarasi Potsdam.

2.1.3 Panglima Tertinggi Pasukan Pendudukan Sekutu atau *Rengō Kokugun Saikō Shireikan* (連合軍最高司令官) atau *Supreme Commander for the Allied Power* (SCAP)

Untuk melaksanakan kebijakan yang akan dijalankan di Jepang, maka ditunjuklah Jenderal Douglas MacArthur sebagai Panglima Tertinggi Pasukan

⁸ Occupation of Japan, Policy and Progress (New York, 1969), hlm.70

Pendudukan Sekutu (SCAP) oleh Presiden Amerika Serikat, Harry Thrumen, yang diumumkan pada tanggal 14 Agustus 1945. Penunjukan ini juga berdasarkan persetujuan kepala negara Inggris, Cina dan Uni Soviet. MacArthur tiba di Jepang pada tanggal 30 Agustus 1945 di pangkalan udara Atsugi. Kemudian dia mendirikan markas besarnya atau *General Headquarters* (GHQ) di Gedung Asuransi Dai-Ichi di seberang Istana Kekaisaran di Tokyo pada tanggal 8 September 1945. Jendral Douglas MacArthur menerima otoritas penunjukannya sebagai Panglima Tertinggi ini pada tanggal 6 September 1945 dalam pernyataan yang disiapkan oleh SWNCC (*State, War, and Navy Coordinating Committee*) yang ditandatangani oleh Presiden Amerika Serikat. Otoritas Jendral Douglas MacArthur dalam posisinya sebagai Panglima Tertinggi Pasukan Pendudukan Sekutu (SCAP) yang tercantum dalam surat pernyataan SWNCC adalah :

1. The outhority of the Emperor and the Japanese Government to rule the State is subordinate to you as Supreme Commander for the Allied Powers. You will exercise your authority as you deem proper to carry out you mission. Our relations with Japan do not rest on a contractual basis, but on an unconditional surrender. Since your authority is supreme, you will not entertain any question on the part of the Japanese as to its scope.
2. Control of Japan shall be exercised through the Japanese Government ti the extent that such an arrangement produce satisfactory results. This does not prejudice your right to act directly if required. You may enforce the orders issued by you by the employment of such measures as you deem necessary, including the use of force.
3. The statement of intentions contained in the Potsdam Declaration will be given full effect. It will not be given effect, however, because we consider ourselves bound in a contractual relationship with Japan as a result of that document. It will be respected and given effect because the Potsdam Declaration forms a part of our policy stated in good faith with relation to Japan and with relation to peace and security in the Far East.⁹

Terjemahan :

1. Otoritas atau wewenang Kaisar dan pemerintah Jepang untuk mengatur negara berada dibawah anda selaku Panglima Tertinggi Pasukan Pendudukan Sekutu. Anda akan menjalankan wewenang anda sepantasnya untuk menjalankan misi anda. Hubungan kita dengan Jepang tidak terletak pada perjanjian dasar, tetapi pada penyerahan tanpa syarat. Sejak wewenang anda adalah yang paling tinggi, anda

⁹ *Ibid, hlm.89*

- tidak perlu menjawab pertanyaan apapun dari Jepang sesuai dengan keleluasaannya.
2. Kendali atas Jepang akan dijalankan melalui pemerintahan Jepang dalam tingkat dimana perencanaan tersebut menghasilkan hasil yang memuaskan. Ini tidak merugikan hak anda untuk bertindak langsung jika diperlukan. Anda boleh menjalankan perintah yang diberikan oleh anda oleh jabatan dengan tingkat yang seperti itu sesuai dengan yang anda anggap perlu, termasuk menggunakan paksaan.
 3. Pernyataan tujuan-tujuan yang terkandung dalam deklarasi Potsdam akan diberlakukan secara penuh. Tujuan-tujuan tersebut tidak akan diberlakukan, bagaimanapun, karena kita mempertimbangkan diri kita dibatasi dalam sebuah hubungan perjanjian dengan Jepang sebagai hasil dari dokumen tersebut. Pernyataan tujuan-tujuan tersebut akan dihormati dan diberlakukan karena Deklarasi Potsdam membentuk bagian dari kebijakan kita yang dinyatakan secara jujur dengan hubungan kepada Jepang dan hubungan kepada perdamaian dan keamanan di Timur Jauh.

Berdasarkan surat pernyataan ini, SCAP mempunyai otoritas penuh untuk menjalankan seluruh kebijakan yang dibuat untuk Jepang. Seluruh wewenang Pemerintah Jepang untuk menjalankan negaranya dipertimbangkan dan diberikan oleh SCAP sesuai dengan batasan-batasan yang diberikan untuk memberikan hasil yang lebih menguntungkan.

Kebijakan pendudukan dirumuskan baik oleh FEC maupun pemerintah Amerika Serikat, tetapi SCAP adalah satu-satunya kekuasaan eksekutif bagi Sekutu di Jepang dan bertanggung jawab atas pelaksanaan setiap keputusan kebijakan Sekutu. Seluruh keputusan kebijakan FEC dikirimkan kepada SCAP melalui Pemerintah Amerika Serikat dalam bentuk perintah langsung kepada SCAP dari Kepala Staf Gabungan Amerika Serikat (*United State Joint Chiefs of Staff*).

Untuk menghemat kekuatan militer dan sumber daya Amerika Serikat, SCAP diperintahkan lebih awal oleh Amerika Serikat dalam pendudukan untuk beroperasi melalui badan-badan dan perwakilan pemerintahan Jepang yang ada, termasuk kekaisaran, dari pada kekuatan militer secara langsung, seperti halnya yang terjadi pada pendudukan di Jerman. Seluruh perintah kepada pemerintah Jepang dikirimkan langsung oleh SCAP, karena baik Amerika Serikat, FEC, maupun Dewan sekutu tidak memiliki posisi strategis dalam berhadapan dengan pemerintah Jepang.

SCAP mendirikan beberapa organisasi untuk menyelesaikan pekerjaannya yaitu melaksanakan kebijakan. Bagian staf khusus didirikan di dalam *General Headquarters* atau Markas Besar di Tokyo. Mereka lah yang akan melaporkan kepada SCAP mengenai pelaksanaan setiap kebijakan yang dijalankan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Staf khusus ini terdiri dari 12 bidang yaitu :

1. *The Economic and Scientific Section* atau Badan Ekonomi dan Ilmu Pengetahuan yang mengurus hubungan ekonomi, industri, keuangan dan Ilmu pengetahuan.
2. *The Civil Information dan Educational Section* atau Badan Pendidikan dan Informasi yang mengurus informasi publik, termasuk pers, radio, gambar, dan teater, pendidikan, agama, dan seni.
3. *The Natural Resources Section* atau Badan Sumber Daya Alam yang mengurus pertanian, kehutanan, perikanan, dan pertambangan.
4. *The Public Health and Welfare Section* atau Badan Kesejahteraan dan Kesehatan yang bertanggung jawab mencegah penyebaran wabah.
5. *The Government Section* atau Badan Pemerintah yang akan mengawasi struktur didalam pemerintahan sipil di Jepang dan pemerintahan militer di bagian selatan Korea.
6. *The Legal Section* atau Badan Hukum yang mengurus masalah hukum.
7. *The International Prosecution Section* atau Badan Penuntut Internasional yang mengurus penuntutan penjahat perang.
8. *The civil Communications Section* Badan Komunikasi yang akan memperbaiki komunikasi lewat radio, pos maupun telegram di Jepang.
9. *The Statistical and Report Section* Badan Laporan dan Statistik yang akan mengumpulkan, memeriksa, dan menyiapkan data statistik dan laporan-laporan.
10. *The Counter-Intelligence Section* Badan Keamanan yang mengurus masalah keamanan.
11. *The Civil Intelligence Section* Badan Intelejen yang akan mengawasi keamanan publik penduduk dan memastikan bahwa pemerintah Jepang memenuhi instruksi dari SCAP.

12. *The Diplomatic Section* Badan Diplomasi yang mengurus masalah hubungan Jepang dengan negara lain.¹⁰

Sesuai dengan ketentuan yang ada, staf khusus ini beserta SCAP akan menyelesaikan tugas mereka melalui pemerintah Jepang. Staf khusus ini akan menyusun rekomendasi yang nantinya akan dipresentasikan kepada SCAP. Jika SCAP menyetujuinya, rekomendasi ini akan diteruskan kepada pemerintah Jepang dalam bentuk perintah atau memorandum. Jika pemerintah Jepang tidak dapat atau tidak melaksanakan perintah atau memorandum tersebut, SCAP akan menyampaikan kepada Amerika Serikat apa yang harus dilakukan sehingga tugas tersebut dapat diselesaikan.

2.2 Kebijakan Awal Amerika Serikat Setelah Penyerahan Bagi Jepang atau *United States Initial Post-Surrender Policy for Japan*

Amerika Serikat mengumumkan gabungan dan proyeksi dari seluruh rencana pendudukan untuk Jepang. Ini dinamakan *United States Initial Post-Surrender Policy for Japan* atau Kebijakan Awal Amerika Serikat Setelah Penyerahan bagi Jepang, yang diumumkan pada tanggal 29 Agustus 1945 sebagai sebuah pernyataan atas kebijakan awal yang berkaitan dengan Jepang setelah penyerahan. Dokumen kebijakan ini merupakan hasil koordinasi dari usaha antara Departemen Luar Negeri, Departemen Perang, dan Angkatan Laut Pemerintah Amerika Serikat. Pencapaian kerjasama ini merupakan hasil pengakuan bahwa dalam masa setelah perang, di Jepang dan daerah lain yang dikuasai oleh pasukan Sekutu, kebijakan militer Amerika Serikat dan kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat harus berfungsi menjadi satu sebagai kebijakan nasional.¹¹

Penyusunan dokumen ini merupakan tanggung jawab subseksi dalam *Far Eastern Commission* yaitu *State, War, and Navy Coordinating Committee* (SWNCC) atau Komite Koordinasi Negara, Perang, dan Angkatan Laut. Setelah disahkan oleh Presiden Amerika Serikat, dokumen ini kemudian diberikan kepada Kepala Staf Gabungan untuk diteruskan kepada SCAP.

Wewenang dari SWNCC sebagai koordinator dari kebijakan luar negeri Amerika Serikat untuk Jepang dan daerah-daerah pendudukan lainnya

¹⁰ *Ibid*, hlm.15

¹¹ *Occupation of Japan, op. cit., hlm.9*

diumumkan pada tanggal 8 April 1946. Pada hari itu, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat juga mengumumkan perintah atau prosedur untuk pengembangan dan peresmian kebijakan Amerika Serikat atas daerah pendudukan, dan yang juga merupakan penjelasan keberadaan dari SWNCC.¹²

Kebijakan awal setelah penyerahan, yang dirumuskan oleh SWNCC yang bekerjasama dengan Kepala Staf Gabungan dan disahkan oleh Presiden, menyatakan dua tujuan utama untuk Jepang yaitu :

1. Untuk menjamin bahwa Jepang tidak akan pernah mengancam keamanan dan kedamaian dunia lagi,
2. Untuk mengadakan pembentukan pemerintahan di Jepang yang demokratis dan damai, sesuai dengan kebebasan berkehendak dari masyarakat Jepang, yang menghormati hak-hak negara lain dan yang mendukung tujuan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa.¹³

Dokumen ini juga berarti bahwa akan membatasi wilayah kekuasaan Jepang. Jepang akan didemiliterisasi dan dilucuti (otoritas dari militer dan pengaruh militer akan dihilangkan sepenuhnya dalam kehidupan politik, ekonomi dan sosial). Rakyat Jepang harus didorong untuk mengembangkan kebebasan individu dan hak-hak asasi manusia, rakyat Jepang juga harus diberikan kesempatan untuk mengembangkan ekonomi mereka sesuai dengan syarat-syarat perdamaian.

Tujuan utama dari pasukan pendudukan di Jepang yang dijabarkan di atas secara umum dilaksanakan dengan melakukan beberapa kebijakan seperti :

1. Pemulangan tentara Jepang dan demobilisasi mereka di Jepang.
2. Penghapusan seluruh rintangan untuk membangkitkan kembali dan mengesahkan kecenderungan demokrasi dan untuk membangun kebebasan berbicara, beragama, berfikir dan menghormati hak-hak asasi manusia.
3. Mengizinkan Jepang untuk mendirikan industri-industri yang menopang ekonomi mereka, dan untuk berpartisipasi dalam perdagangan dunia.

¹² *Ibid*, hlm.82

¹³ Edwin O. Reischauer, *The United States and Japan* (Cambridge, 1957), hlm.341

Lebih khusus lagi, pasukan pendudukan mengumumkan langkah-langkah yang lebih rinci yang mendukung tujuan utama mereka untuk dapat tercapai. Langkah-langkah tersebut antara lain :

1. demobilisasi dan demiliterisasi Jepang,
2. penghukuman kejahatan perang,
3. penghapusan pengaruh orang-orang yang mengantarkan Jepang kepada perang,
4. penghapusan industri perang,
5. pembayaran perbaikan kerusakan perang,
6. pemberian ganti rugi barang yang dirampas Jepang di daerah koloninya,
7. pembatasan wilayah Jepang pada empat pulau utama dan pulau-pulau kecil seperti yang sudah ditentukan Sekutu sebelumnya.¹⁴

Sekutu lebih jauh lagi menyatakan bahwa mereka akan menarik diri mereka dari pendudukan ketika seluruh tujuan ini telah tercapai.

2.2.1 Demiliterisasi

Demiliterisasi dan demokratisasi merupakan dua tujuan kebijakan dari Jendral Douglas MacArthur. Tindakannya, berada di bawah bimbingan pemerintah Amerika Serikat, adalah untuk membebaskan orang-orang Jepang dan memberikan kehidupan yang lebih layak dan lebih sedikit menghukum dibandingkan dengan apa yang diharapkan oleh kekuatan sekutu lainnya, khususnya Uni Soviet.¹⁵ MacArthur berada dibawah pengawasan 11 negara FEC di Washington dan diberikan saran dalam pelaksanaannya oleh Dewan Sekutu untuk Jepang yang berada di Tokyo, yang terdiri dari perwakilan Inggris, Cina, dan Uni Soviet.

Langkah pertama yang dijalankan oleh Jendral Douglas MacArthur adalah melucuti Jepang. Pada tanggal 13 September 1945, perintah dikeluarkan untuk membubarkan *Japanese Imperial General Headquarters* atau Markas Besar Kekaisaran Jepang. Seluruh gudang-gudang senjata dan pabrik-pabrik yang berhubungan dengan produksi senjata militer ditutup. Pangkalan angkatan laut

¹⁴ Huge Borton, *op. cit.*, hlm.302

¹⁵ Frederica M. Bunge, *Japan a country study* (Washington, 1982), hlm.40

dihancurkan dan pulau Kure dekat Hiroshima yang merupakan tempat dua kapal perang terbesar di dunia dibuat, diubah menjadi puing-puing. Seluruh sekolah, klub, dan asosiasi masyarakat yang berhubungan dengan militer dan ilmu bela diri dimusnahkan.

Pada awal tahun 1946, Amerika Serikat merumuskan sebuah perjanjian untuk perlucutan dan demiliterisasi Jepang. Rumusan yang telah disetujui, diumumkan oleh Departemen Luar Negeri pada tanggal 21 Juni 1946. Rumusan perjanjian ini, yang telah dipertimbangkan oleh Cina, Uni Soviet, dan Inggris, menyatakan dalam pembukaannya bahwa Pemerintah Amerika Serikat, Inggris, Cina dan Uni Soviet mengumumkan tujuan mereka untuk memberlakukan perlucutan dan demiliterisasi secara menyeluruh terhadap Jepang. Tujuan ini memang tidak secara nyata tertulis didalam Deklarasi Potsdam 26 Juli 1945, tetapi secara langsung mengacu kepada butir ke enam dari deklarasi ini yang menyatakan bahwa :

“There must be eliminated for all time the authority and influence of those who have deceive and misled the people of Japan into embarking on world conquest...”¹⁶

terjemahan :

“Kekuasaan dan pengaruh dari orang-orang yang telah membohongi dan menunjukkan rakyat Jepang ke jalan yang salah dalam usaha untuk menguasai dunia harus dihilangkan dan disingkirkan untuk selama-lamanya..”

Demiliterisasi melibatkan pembongkaran pasukan bersenjata Jepang, pemulangan kembali personel militer dari luar negeri, dan pemusnahan birokrasi militer, termasuk departemen angkatan darat dan laut serta staf umum angkatan darat dan laut. Fase yang paling hebat dari program ini adalah mengenai penjahat perang dan hukuman. Pemeriksaan pengadilan dan penghukuman ratusan orang-orang yang melakukan kekejaman termasuk dalam kategori ini. Pemeriksaan pengadilan terhadap ratusan orang-orang yang telah melakukan kekejaman dilaksanakan dibawah wewenang sekutu dan diterima secara umum oleh rakyat Jepang sebagai prosedur kriminal biasa, tetapi pemeriksaan di Tokyo atas perkumpulan pemimpin-pemimpin Jepang yang dipimpin oleh Hideki Tōjō secara

¹⁶ Edwin O. Reischauer, op. cit., hlm.339-340

husus dilakukan untuk membuktikan bahwa mereka adalah yang bertanggung jawab atas agresifitas Jepang dalam perang. Oleh karena itu, hukuman orang-orang ini didasarkan atas perlawanan kepada kemanusiaan. Lebih lagi, 28 pemimpin Jepang kelas A diadili atas kejahatan perang atas konspirasi berperang dan kejahatan melawan kemanusiaan, oleh IMTFE (*International Military Tribunal of the Far East*)¹⁷. Dari tanggal 3 Mei 1946 sampai 12 November 1948. Tujuh dari terdakwa dijatuhi hukuman gantung, diantaranya yaitu Jendral Tōjō Hideki yang merupakan Perdana Menteri Jepang ketika dilakukannya penyerangan ke Pearl Harbour. Tōjō Hideki berusaha untuk bunuh diri namun berhasil sembuh dari lukanya.¹⁸ Enam Belas orang dijatuhi hukuman seumur hidup, diantaranya adalah Kido Koichi, Koiso Kuniaki (mantan perdana menteri Jepang pada masa perang), dan Araki Sadao (salah seorang jendral yang memimpin invasi ke Mancuria). Togo Shigenori dan Shigemitsu Mamoru dijatuhi hukuman masing-masing 20 tahun dan 7 tahun penjara. Ultranasionalis Okawa Shumei diputuskan untuk tidak dijatuhi hukuman karena masalah gangguan kejiwaan. Kono Fumimaro (tiga kali menjabat sebagai Perdana Menteri antara Juni 1937 sampai Oktober 1941) dinyatakan bunuh diri pada tanggal 18 Desember 1945.

Kepala Staf Gabungan Amerika juga mempertimbangkan pengadilan atas Kaisar dengan tuduhan sebagai penjahat perang. Pada 29 November 1945 mereka memerintahkan MacArthur untuk menyelidiki apakah ada bukti yang cukup untuk menuntut Kaisar dengan tuduhan sebagai penjahat perang. Dalam telegram rahasia tanggal 25 Januari 1946, MacArthur mengatakan bahwa 'tidak ada bukti yang spesifik dan nyata' telah ditemukan yang dapat melibatkan Kaisar dalam kejahatan perang. MacArthur melanjutkan untuk berdebat bahwa tindakan politik Kaisar telah ditentukan oleh menteri dalam negerinya, yang memikul tanggungjawab atas perang. MacArthur menggambarkan Kaisar sebagai simbol yang mempersatukan seluruh Jepang. Menghancurkan Kaisar berarti sama dengan menghancurkan seluruh Jepang. Dia memperkirakan jika Kaisar diadili, banyak

¹⁷ International Military Tribunal for the Far East merupakan pengadilan yang didirikan pada tanggal 19 January 1946 berdasarkan Deklarasi Potsdam dan undang-undang dasar yang ditetapkan di Nurnberg untuk mengadili pemimpin Nazi. Pengadilan ini bermarkas di Tokyo, dan tujuan didirikan pengadilan ini adalah untuk mengadili setiap penjahat perang.

¹⁸ Occupation of Japan, *op. cit.*, hlm.28

pasukan Jepang akan melakukan balas dendam yang pasti akan melibatkan penduduk Jepang. Pada akhirnya Kaisar dibebaskan dari tuntutan IMTFE ini.

Lebih jauh lagi, salah satu aspek yang lebih penting dari program ini adalah perintah pembersihan secara luas yang dikeluarkan oleh pasukan pendudukan pada Januari 1946. Tidak jelasnya status organisasi seseorang di dalam tubuh pemerintahan Jepang menyebabkan sulit mengetahui ada atau tidaknya orang-orang yang secara aktif terlibat dalam usaha perang. Hal ini menyebabkan dibongkarnya seluruh organisasi yang menyokong pemikiran militeristik dan imperialistik, dan pemecatan dari kantor-kantor pemerintahan setiap individu dan kelompok-kelompok yang telah menunjukkan diri mereka sebagai militan. Hal ini juga termasuk seluruh perwira yang berpangkat letnan muda ke atas dalam angkatan darat atau laut, mereka-mereka yang memegang tempat-tempat penting dalam asosiasi politik nasionalistik yang didirikan dalam kurun waktu sejak dimulainya perang dengan Cina, dan mereka-mereka yang memegang kantor-kantor penting dalam wilayah jajahan atau di organisasi berkembang yang berhubungan dengan eksploitasi mereka. Di bawah ketentuan ini, sekitar 1300 organisasi dibubarkan dan hampir 200.000 orang dikeluarkan dari kantor pemerintahan. satu tahun kemudian, pembersihan ini meluas hingga ke pemerintahan lokal dan pejabat yang berpengaruh di 246 perusahaan besar di Jepang, sejak diasumsikannya bahwa setiap orang yang memegang posisi penting dari tanggungjawab tertinggi dalam industri, keuangan, perdagangan, dan pertanian sejak tahun 1937 merupakan orang-orang yang militan dalam nasionalisme dan penyerangan (*active exponents of militant nationalism and aggression*).¹⁹

Demiliterisasi juga menyentuh bidang ekonomi yaitu dengan melakukan pengurangan terhadap basis-basis ekonomi yang mendukung kekuatan militer Jepang. Tentu saja hal ini tidak bisa dilakukan terlalu luas, karena nantinya akan merusak usaha menciptakan demokrasi di Jepang. Lebih lagi, Jepang telah kehilangan wilayah jajahan mereka, dan hal ini memberikan dampak buruk terhadap industri mereka. Industri pesawat terbang, oli sintetik, karet sintesis dimusnahkan. Penelitian tenaga atom dihentikan dan industri-industri kecil seperti

¹⁹ *ibid. hlm 245-246*

pembuatan bantalan poros (mobil) yang berguna bagi militer ditutup. Batasan-batasan yang ketat terhadap industri-industri besar seperti baja, kimia, alat-alat mesin yang pada masa perang berperan besar di dalam militer diberlakukan.²⁰ Industri-industri besar seperti ini tidak dimusnahkan karena masih sangat dibutuhkan untuk kemajuan ekonomi setelah masa perang berakhir.

2.2.2 Demokratisasi

Tidak seperti proses demiliterisasi yang cepat dan jelas, proses demokratisasi di Jepang berjalan lambat. Masa pendudukan merupakan periode krusial dimana masyarakat diuji untuk melewati berbagai revisi hukum, pendidikan, dan bahkan revolusi sosial secara luas yang menitikberatkan pada pendemokrasian di Jepang. Ujian yang sebenarnya hanya dapat datang melalui beberapa dekade, ketika orang-orang Jepang melihat apakah mereka dapat atau mau menjalankan urusan dan pekerjaan mereka sendiri, dalam situasi yang baik atau buruk, berdasarkan aturan yang demokratis.²¹

Pemerintah Pendudukan melakukan berbagai reformasi di berbagai bidang untuk menunjang proses demokrasi di Jepang, di antaranya yaitu :

1. Bidang Politik

Reformasi pertama yang dilakukan adalah merevisi badan hukum dan politik di Jepang, memodifikasi atau menghilangkan setiap hukum dan institusi yang menghalangi perkembangan demokrasi, dan membuat aturan baru yang dapat membantu perkembangan demokrasi. Menurut pemerintah pendudukan, kebijakan demiliterisasi juga merupakan bagian yang penting dalam usaha untuk menciptakan Jepang yang lebih demokratis.

Untuk memberikan kebebasan demokratis kepada masyarakat Jepang, SCAP pada tanggal 4 Oktober 1945 mengeluarkan perintah yang kemudian dikenal sebagai "*Bill of Right*" atau Pernyataan Hak-Hak Manusia. Perintah ini memerintahkan untuk melepaskan tahanan politik dan memberitahukan pemerintah Jepang tentang yang harus dilakukan untuk menghilangkan pembatasan-pembatasan kebebasan politik, sipil dan agama, serta

²⁰ *ibid.* hlm.247

²¹ *ibid.* hlm.253

diskriminasi ras, kebangsaan, kepercayaan, dan berpendapat dalam politik. Undang-undang yang membatasi kebebasan berpendapat, berserikat dan berkumpul juga dicabut. Hak-hak kaum wanita dalam mengikuti pemilu serta menduduki jabatan umum juga diakui.

Perintah ini melucuti hampir seluruh kekuasaan Kementerian Dalam Negeri Jepang, yang dalam kurun waktu yang panjang telah menjadi organisasi yang paling berkuasa di Jepang. Menteri Dalam Negeri, Kepala Kantor Kepolisian Kementerian Dalam Negeri, Kepala Kepolisian Kota Besar Tokyo dan kota-kota besar lainnya, Kepala Kepolisian Wilayah Administratif Hokkaido, dan seluruh Kepala Kepolisian prefektur serta personilnya dipecat dari jabatannya dan tidak satupun dari orang-orang ini boleh ditunjuk kembali untuk menempati posisi apapun di bawah Departemen Dalam Negeri, Departemen Kehakiman, atau badan kepolisian apapun yang ada di Jepang.²² Sekitar 5000 anggota badan kepolisian di Jepang dikeluarkan dari kepolisian. Pemerintah Jepang juga harus melaporkan seluruh tindakan secara lengkap berkaitan dengan perintah ini dalam batas waktu sampai 15 Oktober 1945. Perintah selanjutnya dikeluarkan pada tanggal 16 Januari 1946, yang memerintahkan untuk membubarkan *Kenpeitai* (憲兵隊) atau organisasi polisi rahasia, dan membubarkan organisasi lain. Seluruh senjata dan amunisi yang menjadi milik *Kenpeitai* dan organisasi yang sejenis harus dikembalikan kepada Pasukan Pendudukan Amerika Serikat sebelum tanggal 1 Maret 1946.²³

Dalam usaha untuk membangun demokrasi di masyarakat Jepang, maka SCAP memberitahukan kepada Perdana Menteri Jepang pada saat itu bahwa reformasi yang harus dilaksanakan oleh Jepang dalam rangka pemenuhan Deklarasi Potsdam juga harus merevisi Konstitusi Meiji Jepang. Pada tanggal 11 Oktober 1945, Kaisar memerintahkan Pangeran Konoe untuk mempelajari permasalahan revisi Konstitusi ini dan membentuk *Constitutional Problem Investigation Committee* atau Komite Investigasi Masalah Konstitusi. Satu bulan kemudian Konoe menyerahkan proposal awal yang cukup baik untuk

²² Occupation of Japan, *op. cit.*, hlm.97

²³ *ibid.* hlm.19

revisi Konstitusi, tetapi kemudian usahanya dinodai oleh sebuah tuduhan yang menyatakan dia sebagai penjahat perang.²⁴

Pada 25 Oktober 1945 kabinet baru yang terbentuk dengan Shidehara Kikuuro sebagai Perdana Menteri, mendirikan Komite Investigasi Masalah Konstitusi yang baru dengan Dr. Matsumoto Jouji (seorang ahli hukum tata negara) sebagai pimpinannya. Matsumoto Jouji menggantikan Konoe yang dipenjarakan atas tuduhan sebagai penjahat perang dan akhirnya melakukan bunuh diri pada tanggal 18 Desember 1945 di penjara Sugamo, Tokyo. Komisi ini berhasil membuat Rancangan Undang-Undang Dasar Jepang yang baru, dan dipublikasikan pada tanggal 6 Maret 1946. Pada tanggal 3 November 1946 Undang-Undang Dasar Jepang yang baru diproklamkan dan diberlakukan secara penuh pada tanggal 3 Mei 1947. Undang-undang yang baru ini terdiri dari Pembukaan, 11 bab dan 103 Pasal.

Undang-Undang Dasar Jepang yang baru ini dalam Pasal satunya juga menyatakan bahwa Kaisar hanya merupakan simbol negara dan mempersatukan rakyat, kedudukannya berasal dari keinginan rakyat yang memiliki kedaulatan.²⁵

2. Bidang Ekonomi

Pandangan SCAP terhadap persoalan perekonomian Jepang, seperti juga persoalan pada bidang politik, pendidikan dan lain-lain, didasarkan pada dasar-dasar kebijakan yang tertuang dalam Deklarasi Potsdam. Tujuan dari perubahan yang dilakukan dalam bidang ekonomi ini adalah untuk mengubah industri dan perdagangan Jepang agar tidak lagi dipergunakan untuk keperluan perang, serta juga memberi kesempatan kepada masyarakat Jepang untuk memenuhi segala kebutuhan mereka setelah masa perang berakhir, sejalan dengan perkembangan demokrasi dan perdamaian di Jepang.

Dua bulan pertama masa pendudukan merupakan masa terjadinya kelaparan di berbagai daerah Jepang.²⁶ Hal ini disebabkan oleh terputusnya distribusi bahan-bahan pangan akibat adanya penimbunan bahan pangan

²⁴ Stephen S. Large, *Emperor Hirohito and Showa Japan* (New York, 1996), hlm.149

²⁵ *Ibid*, hlm.150

²⁶ *Occupation of Japan, op. cit.*, hlm.38

karena buruknya hasil panen akibat adanya kelangkaan pupuk dan terjadinya angin taifun yang bertiup dari Laut Cina (merupakan hasil panen terburuk selama 30 tahun terakhir).²⁷ Prioritas utama MacArthur dalam masa ini adalah menyediakan distribusi makanan yang cukup kepada seluruh masyarakat Jepang. Hingga awal bulan April 1946, kelaparan masaih terjadi dimana-mana. Masyarakat Jepang mulai melakukan demonstrasi untuk mengkritik pemerintah yang tidak secara tanggap menyelesaikan masalah ini. Pada bulan Mei, Kaisar Hirohito untuk kedua kalinya berbicara di radio menyampaikan kepada seluruh rakyatnya untuk berbagi dengan sesama dalam masa kesukaran dan kemiskinan ini, dengan begitu masalah ini dapat diatasi.²⁸ Pada bulan yang sama, terjadi demostrasi besar di Tokyo, Yokohama serta kota-kota lainnya, menuntut ditingkatkannya persediaan makanan. Sekitar 16000 ton makanan didistribusikan, tetapi kelaparan masih tetap terjadi.

Pada tanggal 6 November 1945 SCAP mengeluarkan perintah untuk membubarkan Zaibatsu. Zaibatsu merupakan gabungan beberapa perusahaan-perusahaan besar seperti Mitsui, Mitsubishi, Yasuda, dan Sumitomo dilikuidasi. Perintah ini adalah untuk menghentikan peran Zaibatsu dalam membiayai seluruh kebutuhan perang Jepang.²⁹ Selama masa perang berlangsung, sejak tahun 1931, Zaibatsu telah mengubah tujuan produksi dan keuangan mereka untuk keperluan militer Jepang. Produksi utama yang sebelumnya adalah sutra dan tekstil, diubah menjadi besi, baja dan mesin-mesin. Pembubaran Zaibatsu ini juga untuk menghentikan praktik monopoli, pengkekangan perdagangan, dan menjamin pemisahan perbankan untuk perdagangan, industri, dan pertanian sehingga mengembangkan ekonomi Jepang ke arah yang lebih demokratis.

Selain itu, pasukan pendudukan juga melakukan reformasi dalam bidang agraria. Dua rancangan undang-undang, yang disahkan pada Oktober 1946, mengharuskan para pemilik tanah menjual kelebihan tanah mereka kepada pemerintah, yang dijual kembali kepada para petani penyewa dengan harga

²⁷ *Ibid*, hlm.38

²⁸ *Ibid*, hlm.40

²⁹ *Ibid*, hlm.166

yang layak. Lebih dari 2,7 juta petani memperoleh 4,46 juta hektar tanah melalui program ini.³⁰

Pada bulan September 1945, SCAP mengeluarkan perintah yang berhubungan dengan asosiasi buruh di Jepang. SCAP mengatakan bahwa dengan dipulangkannya para pekerja Cina dan Korea yang bekerja di tambang-tambang batu bara di Jepang, sangat dibutuhkan orang-orang untuk bekerja di tambang-tambang batu bara yang ada untuk mempercepat perbaikan industri di Jepang. Tanpa batu bara yang tersedia dengan cukup, produksi dan distribusi makanan juga akan terhambat.

3. Bidang Pendidikan

Sistem pendidikan umum juga mengalami perombakan untuk mempercepat proses demokratisasi. Penekanan pada persamaan kesempatan dan pengembangan kepribadian individu diterapkan. Indoktrinasi ultranasionalistik dan latihan militer dihilangkan, serta mengarahkan pendidikan pada semangat demokrasi dan toleransi beragama. Reformasi ini juga membawa perubahan struktural penting. Undang-Undang Pendidikan Sekolah diresmikan tahun 1947. Secara umum pendidikan Jepang menggunakan sistem pendidikan 6-3-3-4 dengan pendidikan wajib 9 tahun. Biaya pendidikan gratis untuk sekolah dasar, serta memperbaharui kurikulum untuk tingkat universitas. Pendidikan umum didesentralisasikan ke Prefektur. Administrasi pendidikan ditempatkan pada badan-badan yang baru dibentuk, seperti *Local Board of Education* atau Badan Pendidikan Daerah. Kendali kurikulum dan penentuan buku teks dipindahkan dari Kementerian Pendidikan ke sekolah setempat. Guru dibebaskan dari aturan-aturan yang kaku, dan diizinkan untuk membentuk perkumpulan-perkumpulan. Pada tanggal 8 Juni 1947, *Nikkyōso* atau *Nihon Kyōshokuin Kumiai* (日本教職員組合), yang merupakan persatuan guru-guru di Jepang didirikan. Diskriminasi antara pria dan wanita dihapus, dan pendidikan bersama (pria dan wanita) diizinkan

³⁰ Frederica M. Bunge, *Japan a country study* (Washington, 1982), hlm.41